

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Tingkat kemiskinan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu negara, semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sejahtera pula masyarakatnya. Selain itu, kesejahteraan masyarakat merupakan indikator dari tercapainya keberhasilan suatu negara yang berarti bahwa tingginya tingkat kesejahteraan menunjukkan bahwa masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari berbagai aspek kehidupannya (Gandasari et al., 2021).

Bappenas (2017) menyatakan tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang yang diterangkan pada Sidang Umum PBB adalah tanpa kemiskinan (tujuan utama), tanpa kelaparan, meningkatkan kesehatan, pendidikan berkualitas, mengatasi perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan menciptakan keadilan sosial. Tujuan tersebut dirancang untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

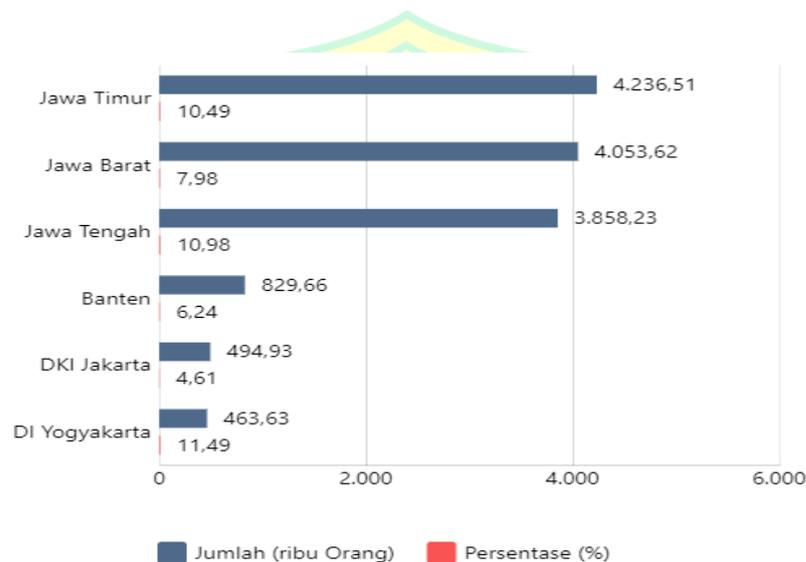
*United Nations* (2018) menyatakan dalam *Implementation of the Third United Nations Decade for the Eradication of Poverty* bahwa permasalahan kemiskinan masih dinilai sulit untuk diselesaikan dan menjadi salah satu permasalahan yang mendapatkan perhatian oleh organisasi dunia tersebut. Melalui *Sustainable*

*Development Goals* (SDGs) permasalahan kemiskinan menjadi prioritas utama untuk dapat diakhiri pada tahun 2030. Keputusan tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi permasalahan sederhana yang disebabkan oleh satu faktor saja, namun kemiskinan menjadi suatu permasalahan bagi seluruh negara di dunia yang disebabkan oleh beragam faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan sulit untuk diuraikan.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2023) adalah ketidakmampuan ekonomi sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan permasalahan dimana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mencakup kebutuhan primer dan sekunder. Kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai kondisi dimana masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan rendahnya kualitas diri.

Badan Pusat Statistik (2022) mencatat bahwa, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan pada September 2022 sebesar 0,76% dibandingkan pada Maret 2022 dengan jumlah mencapai 26,35 juta penduduk. Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan bahwa kenaikan tersebut menjadi nilai tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Penyebab kenaikan tersebut dipengaruhi oleh tingginya angka penduduk terdampak PHK akibat pandemi, tingginya konsumsi rumah tangga, serta menurunnya laju inflasi (Sopiah, 2023, 17 Januari). Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan terpengaruhnya jumlah pengeluaran masyarakat miskin untuk

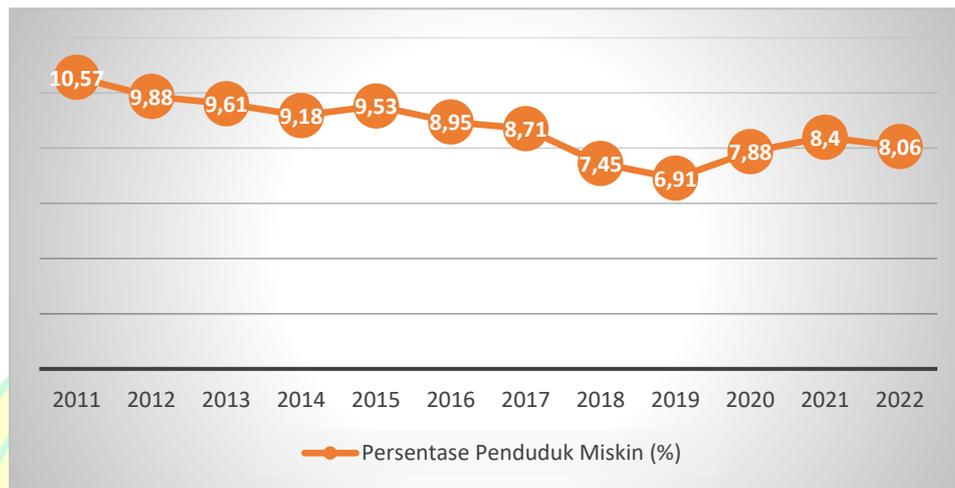
memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan mereka.



**Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

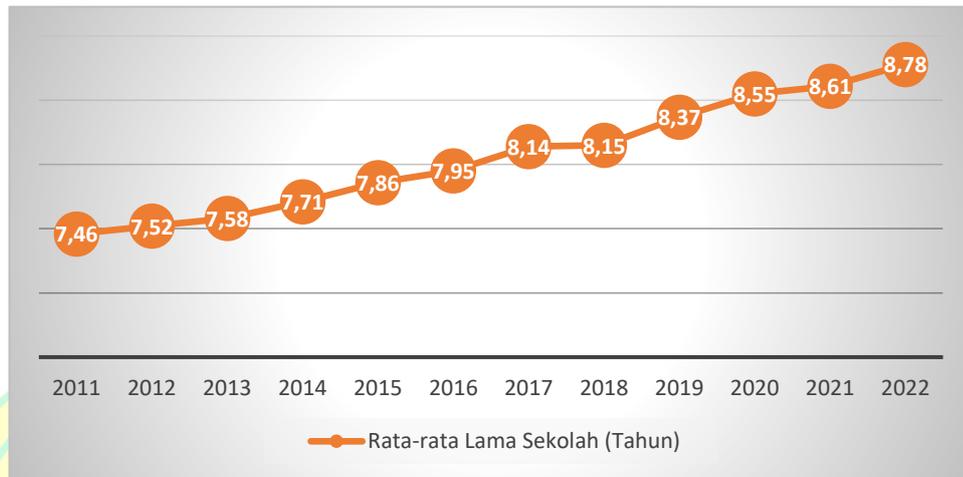
Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi ke-4 yang memiliki tingkat penduduk miskin di Pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian terdapat 122 kawasan industri di Indonesia dan 34 diantaranya berada di Jawa Barat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan jantung industri nasional. Oleh karena itu, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023) Jawa Barat menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar ke-2 di Pulau Jawa mencapai 5% setelah DI Yogyakarta yang mencapai 5,07%. Namun, walaupun Provinsi Jawa Barat memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Provinsi Jawa Barat masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang harus diperhatikan dan diatasi.



**Gambar 1. 2 Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023

Berdasarkan data BPS Jawa Barat yang ditunjukkan pada gambar 1.2 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin berada pada angka 7,45 persen, namun mengalami kenaikan hingga angka 8,06 persen pada tahun 2022. Menurut BPS, Provinsi Jawa Barat berada pada urutan ke-16 sebagai provinsi yang memiliki persentase penduduk terendah tingkat nasional. Namun, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat ke-2 terbanyak nasional. Dilaporkan oleh Ika (2021, 24 Agustus), menurut Wakil Gubernur Jawa Barat faktor-faktor penyebab kenaikan persentase penduduk miskin di Jawa Barat, diantaranya adalah rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki keterampilan yang tinggi, serta rendahnya tingkat kesehatan dan kurangnya akses kepada fasilitas kesehatan.



**Gambar 1. 3 Rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat tergolong rendah. Perkembangan rata-rata lama sekolah selama 11 tahun terakhir cenderung lambat. Menurut data BPS angka partisipasi kasar pendidikan di Provinsi Jawa Barat rendah, rata-rata hanya setara dengan kelas 2 SMP. Pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah hanya mencapai 8,78 tahun atau setara kelas 2 SMP. Walaupun terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun angka tersebut masih tergolong rendah. Faktor utama rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan di Jawa Barat dan ketidakmampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan yang layak hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Menurut Putria et al., (2023) sektor pendidikan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas kompetensi. Sesuai dengan teori *human capital* dikutip dari Linggawati & Wenagama, (2022), tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai

salah satu aspek yang dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Hal ini dikarenakan, tingkat pendidikan yang tinggi akan menunjukkan tingginya kualitas masyarakat sehingga mereka mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk mencapai kesejahteraan.

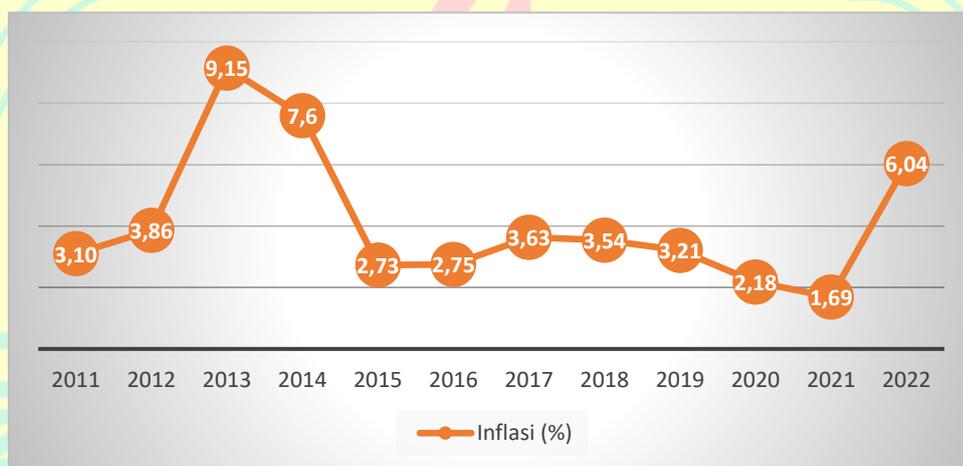


**Gambar 1. 4 Laju indeks kesehatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023

Pada gambar di atas dapat dilihat grafik laju indeks kesehatan di cenderung tetap selama tahun 2018 sampai tahun 2021 dan mengalami kenaikan di tahun 2022. Indeks kesehatan sendiri menunjukkan pembangunan fasilitas kesehatan, dimana selama 10 tahun terakhir Provinsi Jawa Barat masih belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, (2022) permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indeks kesehatan adalah ketimpangan bantuan Pemda, indikator masyarakat yang merokok masih tinggi, ketidakmerataan kompetisi ketenagaan kesehatan di puskesmas, serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasana pendukung kesehatan.

Berdasarkan studi Emberson et al., (2021) menemukan bahwa status kesehatan seseorang berpengaruh terhadap aktivitas sosialnya. Dalam hal ini individu dinilai dapat memberikan manfaat bagi sekitarnya melalui aktivitas sosial. Hal tersebut didukung oleh studi D'Hont et al., (2019) yang menyatakan bahwa status kesehatan manusia mempengaruhi produktivitasnya dalam bekerja sehingga ia lebih mampu bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat mempengaruhi pendapatannya.



**Gambar 1. 5 Tingkat inflasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023

Berdasarkan gambar di atas tingkat inflasi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga menyentuh angka 6,04% dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai angka 1,69%. Menurut kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Marsudijono menyatakan bahwa faktor utama terjadinya inflasi sebesar 6,04% disebabkan oleh kenaikan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta terdapat kenaikan pula pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Angka tersebut juga dinilai sebagai tingkat inflasi terbesar nomor 2 di Indonesia.

Inflasi menurut Badan Pusat Statistik (2023) adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Kenaikan harga barang dan jasa dapat menyebabkan turunnya nilai uang. Sehingga, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Berdasarkan teori inflasi yang disampaikan oleh Keynes dalam Prasetyo (2012), inflasi disebabkan adanya keinginan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya diluar batas kemampuannya. Sikap tersebut akan mengantarkan kepada tingginya tingkat permintaan akan suatu barang dan jasa namun kuantitas barang dan jasa yang tersedia di pasar tidak memenuhi permintaan masyarakat. Akibatnya, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan namun pendapatan masyarakat tidak mengalami perubahan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Retnaningtyas (2019) bahwa pendidikan yang tinggi akan menurunkan tingkat kemiskinan, perkembangan fasilitas kesehatan yang baik akan menurunkan tingkat kemiskinan, dan penurunan tingkat inflasi dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Peneliti berkesimpulan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi serta kondisi kesehatan yang baik dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Kondisi perekonomian negara seperti inflasi juga memiliki peran dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di suatu negara, sehingga pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur dan memperbaiki kondisi perekonomian negara untuk mendukung upaya pemberantasan kemiskinan yang menjadi tujuan utama dari SDGs.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengembangkan faktor-faktor yang diyakini mampu memengaruhi jumlah penduduk miskin meliputi, Pendidikan, Kesehatan, dan Inflasi. Sehingga judul penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya.
2. Tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang tergolong rendah.
3. Adanya penurunan laju indeks kesehatan di Provinsi Jawa Barat
4. Meningkatnya inflasi yang menyebabkan pendapatan riil masyarakat menurun dan mempengaruhi daya belinya sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di Provinsi Jawa Barat.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?

2. Apakah terdapat pengaruh tingkat kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah variabel tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui pengaruh tingkat kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
4. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan inflasi secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan upaya dalam memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mengatasi inflasi.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan dan upaya menguranginya berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan inflasi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai pengaplikasian teori yang telah diterima peneliti selama proses perkuliahan.

### **b. Bagi Universitas**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta penelitian lebih lanjut nantinya.

